

SKRIPSI

ANALISIS DETERMINAN TINGKAT KEMISKINAN KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI SULAWESI SELATAN PERIODE 2010-2021

IFFAH HAFIZHAH

A011181344



**DEPARTEMEN ILMU EKONOMI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2022**

SKRIPSI

ANALISIS DETERMINAN TINGKAT KEMISKINAN KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI SULAWESI SELATAN PERIODE 2010-2021

Sebagai Salah Satu Persyaratan untuk Memperoleh
Gelar Sarjana Ekonomi

disusun dan diajukan oleh

**IFFAH HAFIZHAH
A011181344**



kepada

**DEPARTEMEN ILMU EKONOMI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2022**

SKRIPSI

ANALISIS DETERMINAN TINGKAT KEMISKINAN KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI SULAWESI SELATAN PERIODE 2010-2021

Disusun dan diajukan oleh:

IFFAH HAFIZHAH

A011181344

telah dipertahankan dalam sidang ujian skripsi

Makassar, 13 Juni 2022

Pembimbing I



Dr. Sanusi Fattah, SE., M.Si., CSF., CWM®.
NIP. 19690413 199403 1 003

Pembimbing II



Dr. Nur Dwiana Sari Saudi, SE., M.Si., CWM®.
NIP. 19770119 200801 2 008

Ketua Departemen Ilmu Ekonomi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Hasanuddin



Dr. Sanusi Fattah, SE., M.Si., CSF., CWM®.
NIP. 19690413 199403 1 003

SKRIPSI

ANALISIS DETERMINAN TINGKAT KEMISKINAN KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI SULAWESI SELATAN PERIODE 2010-2021

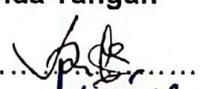
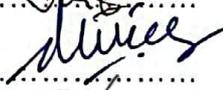
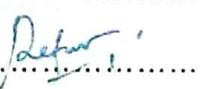
Disusun dan diajukan oleh:

IFFAH HAFIZHAH

A011181344

Telah dipertahankan dalam sidang ujian skripsi
pada tanggal **13 Juni 2022**
dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

Menyetujui,
Panitia Penguji

No	Nama Penguji	Jabatan	Tanda Tangan
1	Dr. Sanusi Fattah, SE., M.Si., CSF., CWM®.	Ketua	1..... 
2	Dr. Nur Dwlana Sari Saudi, SE., M.Si., CWM®.	Sekretaris	2..... 
3	Dr. Hamrullah, SE., MSi., CSF.	Anggota	3..... 
4	Dr. Retno Fitrianti, SE., M.Si., CWM®.	Anggota	4..... 

Ketua Departemen Ilmu Ekonomi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Hasanuddin



Dr. Sanusi Fattah, SE., M.Si., CSF., CWM®.
NIP. 19690413 199403 1 003

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama Mahasiswa : **Iffah Hafizhah**
Nomor Pokok : A011181344
Program Studi : Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi
dan Bisnis UNHAS
Jenjang : Sarjana (S1)

Menyatakan dengan ini bahwa Skripsi dengan judul ***Analisis Determinan Tingkat Kemiskinan Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Selatan Periode 2010-2021*** adalah karya saya sendiri dan tidak melanggar hak Cipta pihak lain. Apabila dikemudian hari Skripsi karya saya ini terbukti bahwa sebagian atau keseluruhannya adalah hasil karya orang lain yang saya pergunakan dengan cara melanggar hak cipta pihak lain, maka saya bersedia menerima sanksi

Makassar,
Yang Menyatakan



(Iffah Hafizhah)

No. Pokok: A011181344

PRAKATA



Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Dengan mengucapkan syukur Alhamdulillah dan puji syukur kehadiran Allah SWT atas segala rahmat, hidayah, karunia, dan anugerahNYA sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat dan salam tak lupa peneliti kirimkan kepada Rasulullah SAW, beserta segala orang-orang yang tetap setia meniti jalannya sampai akhir zaman.

Skripsi dengan judul “**ANALISIS DETERMINAN TINGKAT KEMISKINAN KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI SULAWESI SELATAN PERIODE 2010-2021**” disusun sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan program sarjana strata satu (S1) pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin. Dalam proses penulisan skripsi ini, peneliti banyak mendapat dukungan, bantuan, dan masukan dari berbagai pihak baik langsung maupun tidak langsung. Skripsi ini juga tak luput dari kekurangan-kekurangan dan kesalahan-kesalahan karena keterbatasan dari peneliti.

Oleh karena itu dengan segala kerendahan hati, penulis menyampaikan terima kasih yang tidak terhingga dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada yang terhormat kedua orang tua saya, untuk Ayahanda Prof. Dr. Shahabuddin, M.Si., dan Ibunda Riskayati Latief, M.Pd. yang telah banyak mendoakan, mendidik dan membesarkan peneliti dengan penuh keikhlasan dan kasih sayang tanpa batas yang begitu besar dan nyata. Semoga Allah SWT senantiasa memberi kesehatan, menjaga dan memberikan kemuliaan atas semua tanggung jawab dan semua hal yang begitu sangat berarti yang telah dilakukan oleh beliau. Kepada seluruh keluarga besar yang tak sempat peneliti sebutkan, terima kasih yang sebesar-besarnya atas doa dan motivasi kepada peneliti.

Pada kesempatan ini penulis juga hendak mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Ir. Jamaluddin Jompa, MSc. selaku Rektor Universitas Hasanuddin beserta jajarannya.
2. Bapak Prof. Dr. H. Abdul Rahman Kadir, SE., M.Si., CIPM., CWM, CRA., CRP. selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Bapak Dr. Mursalim, SE., M.Si, CRA., CRP., CWM. selaku Wakil Dekan I Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Bapak Dr. Arifuddin, SE., Ak., M.Si., CA. selaku Wakil Dekan II Fakultas Ekonomi dan Bisnis, dan Bapak Dr. Anas Iswanto Anwar, SE., MA., CWM. selaku Wakil Dekan III Fakultas Ekonomi dan Bisnis.
3. Bapak Dr. Sanusi Fattah, SE, M.Si., CSF., CWM. selaku Ketua Departemen Ilmu Ekonomi sekaligus penasihat akademik dan dosen pembimbing I peneliti, serta Ibu Dr. Nur Dwiana Sari Saudi, S.E, M.Si. selaku Sekretaris Departemen Ilmu Ekonomi sekaligus pembimbing II peneliti. Terima Kasih atas segala bantuan dan motivasi yang senantiasa diberikan hingga peneliti dapat menyelesaikan studi di Departemen Ilmu Ekonomi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Hasanuddin. Terima kasih pula atas arahan, bimbingan, saran dan waktu yang telah diberikan kepada peneliti selama penyusunan skripsi ini serta permohonan maaf yang sebesar-besarnya bilamana selama proses bimbingan skripsi peneliti secara tidak sengaja melakukan kesalahan yang menyinggung perasaan Bapak dan Ibu. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan kesehatan dan kemudahan dalam segala urusan Bapak dan Ibu.
4. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis yang telah memberikan ilmu pengetahuan, arahan, bimbingan dan nasihat kepada peneliti selama menuntut ilmu di Universitas Hasanuddin.
5. Segenap Pegawai Akademik, Kemahasiswaan dan Perpustakaan E-Library Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin yang telah membantu peneliti dalam menyelesaikan studi.

6. Seluruh Keluarga besar KSEI FoSEI Unhas dan FoSSEI Nasional. Terimakasih telah memberikan pengaruh positif kepada peneliti selama berproses di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin, serta menjadi tempat belajar bagi peneliti utamanya di bidang ekonomi Islam. Semangat terus dalam menjalankan dakwah ini. Terus tanamkan ukhuwah, dakwah dan ilmiah dalam diri.
7. Seluruh Keluarga besar Waqf Center for Indonesian Development and Studies (WaCIDS), Yayasan Gerakan Indonesia Mengajar, Sharfin, Gandeng Foundation, dan GenBI UNHAS, yang telah kebersamai dan memberi wadah untuk tumbuh, berjejaring, dan mengembangkan diri selama menjadi Mahasiswa.
8. Teman-teman LANTERN atas semangat, dukungan, bantuan dan doa yang diberikan selama menempuh studi. Semoga cita-cita dan impian kita semua dapat tercapai. Tetap kompak dan tetap semangat, semoga semuanya segera meraih gelar S.E secepatnya tanpa terkecuali, Aamiin.
9. Dan tentunya kepada semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu, yang dengan tulus memberikan motivasi serta doa sehingga atas izin Allah SWT skripsi ini dapat terselesaikan. Peneliti menyadari bahwa masih banyak kekurangan yang terdapat dalam skripsi ini. Oleh karena itu, peneliti mengharapkan saran dan kritik bagi pembaca demi kesempurnaan skripsi ini. Peneliti juga mengharapkan semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat dan pengetahuan bagi kita semua. Aamiin.

Makassar, Mei 2022

Iffah Hafizhah

ABSTRAK

ANALISIS DETERMINAN TINGKAT KEMISKINAN KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI SULAWESI SELATAN PERIODE 2010-2021

Iffah Hafizhah
Sanusi Fattah
Nur Dwiana Sari Saudi

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh pertumbuhan ekonomi, ketimpangan pendapatan, Indeks Pembangunan Manusia (IPM), dan kapasitas fiskal terhadap tingkat kemiskinan pada kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Selatan selama periode tahun 2010-2021. Penelitian ini merupakan penelitian jenis kuantitatif dengan menggunakan data sekunder yang diperoleh dari statistik Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Sulawesi Selatan dan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Data-data tersebut ditabulasikan ke dalam struktur data panel yaitu gabungan antara data yang berbentuk *time series* dan *cross section* dalam bentuk tahunan. Dengan teknik *purposive sampling*, penelitian ini menggunakan data 24 kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Selatan untuk kemudian dianalisis dengan metode Teknik Analisis Regresi Data Panel dengan pendekatan *Random Effect*. Hasil empiris membuktikan bahwa seluruh variabel determinan yang terdiri dari pertumbuhan ekonomi regional, ketimpangan pendapatan, IPM, dan kapasitas fiskal secara simultan berpengaruh signifikan terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Sulawesi Selatan. Sementara secara parsial, variabel pertumbuhan ekonomi dan IPM berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan, sedangkan ketimpangan pendapatan dan kapasitas fiskal yang terdiri atas transfer fiskal dan belanja publik memiliki pengaruh positif terhadap angka kemiskinan dengan tingkat pengaruh yang signifikan. Oleh karena itu, pemerintah kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Selatan diharapkan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan bersifat inklusif, meningkatkan fasilitas pendidikan dan fasilitas kesehatan secara merata tidak hanya terpusat pada satu daerah saja, serta meningkatkan pengawasan keuangan terkait pengeluaran atau belanja pemerintah kabupaten/ kota agar tepat sasaran sehingga pengeluaran atau belanja pemerintah dapat terus berjalan efektif dan efisien dalam upaya pengurangan kemiskinan.

Kata Kunci:

Kemiskinan, Sulawesi Selatan, Pertumbuhan Ekonomi, Indeks Pembangunan Manusia, Ketimpangan Pendapatan, Kapasitas Fiskal

ABSTRACT

DETERMINANT ANALYSIS OF DISTRICT/CITY POVERTY LEVEL IN SOUTH SULAWESI PROVINCE 2010-2021

Iffah Hafizhah
Sanusi Fattah
Nur Dwiana Sari Saudi

This study aims to analyze the effect of economic growth, income inequality, Human Development Index (HDI), and fiscal capacity on poverty levels in districts/cities in South Sulawesi Province during the period 2010-2021. This research is a quantitative type of research using secondary data obtained from the Central Statistics Agency (BPS) statistics of South Sulawesi Province and the Directorate General of Fiscal Balance (DJPK) of the Ministry of Finance of the Republic of Indonesia. These data are tabulated into a panel data structure, which is a combination of data in the form of time series and cross-sections in an annual period. Using the purposive sampling technique, this research uses data from 24 districts/cities in South Sulawesi Province and then analyzed using Panel Data Regression Analysis Technique with a Random Effect approach. Empirical results prove that all determinant variables consisting of regional economic growth, income inequality, HDI, and fiscal capacity simultaneously significantly affect poverty levels in South Sulawesi Province. While partially, economic growth and HDI variables have a negative and significant effect on poverty levels, while income inequality and fiscal capacity consisting of fiscal transfers and public spending positively influence poverty rates with a significant level of influence. Therefore, the district/city government in South Sulawesi Province is expected to encourage quality and inclusive economic growth, improve education facilities and health facilities evenly, not only focusing on one area, and improve financial supervision related to expenditures of district/city governments to run effectively and efficiently in poverty reduction efforts.

Keywords:

Poverty, South Sulawesi, Economic Growth, Human Development Index, Income Inequality, Fiscal Capacity

DAFTAR ISI

	Halaman
SKRIPSI	i
SKRIPSI	ii
LEMBAR PERSETUJUAN.....	iii
PERNYATAAN KEASLIAN.....	v
PRAKATA	vi
ABSTRAK	ix
ABSTRACT	x
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR GAMBAR	xiii
DAFTAR TABEL.....	xiv
DAFTAR LAMPIRAN.....	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Rumusan Masalah.....	9
1.3. Tujuan Penelitian	9
1.4. Manfaat Penelitian	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	11
2.1. Landasan Teori.....	11
2.1.1. Kemiskinan.....	11
2.1.2. Pertumbuhan Ekonomi	15
2.1.3. Ketimpangan Pendapatan	16
2.1.4. Indeks Pembangunan Manusia	18
2.1.5. Kapasitas Fiskal	21
2.2. Hubungan Antar Variabel.....	25
2.2.1. Hubungan Kemiskinan dengan Pertumbuhan Ekonomi.....	25
2.2.2. Hubungan Kemiskinan dengan Ketimpangan Pendapatan	25
2.2.3. Hubungan Kemiskinan dengan Indeks Pembangunan Manusia	26
2.2.4. Hubungan Kemiskinan dengan Kapasitas Fiskal	26
2.3. Penelitian Terdahulu.....	27
2.4. Kerangka Pikir Penelitian	29
2.5. Hipotesis Penelitian	31
BAB III METODE PENELITIAN	32
3.1. Ruang Lingkup Penelitian	32
3.2. Jenis dan Sumber Data.....	32

3.3. Variabel yang Digunakan	33
3.4. Metode Pengumpulan Data.....	33
3.5. Metode Analisis Data	33
3.6. Definisi Operasional.....	40
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	42
4.1. Gambaran Umum Variabel Penelitian	42
4.2. Pemilihan Model Data Panel	49
4.2.1. Uji Chow.....	50
4.2.2. Uji Hausman.....	51
4.2.3. Uji Lagrange Multiplier.....	51
4.3. Hasil Analisis Regresi Data Panel.....	53
4.4. Uji Statistik.....	54
4.4.1. Uji t.....	55
4.4.2. Uji F	55
4.4.3. Koefisien Determinasi	56
4.5. Uji Asumsi Klasik	56
4.5.1. Uji Normalitas.....	56
4.5.2. Uji Multikolinearitas	57
4.5.3. Uji Heteroskedastisitas	57
4.5.4. Uji Autokorelasi	57
4.6. Pembahasan	57
4.6.1. Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi terhadap Tingkat Kemiskinan	57
4.6.2. Pengaruh Ketimpangan Pendapatan terhadap Tingkat Kemiskinan	59
4.6.3. Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia terhadap Tingkat Kemiskinan	61
4.6.4. Pengaruh Kapasitas Fiskal terhadap Tingkat Kemiskinan ..	63
BAB V PENUTUP.....	67
5.1. Kesimpulan	67
5.2. Saran	68
DAFTAR PUSTAKA	72
LAMPIRAN.....	79

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 1. 1. Data Kemiskinan 24 Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2010-2021	2
Gambar 2. 1. Bagan Kerangka Pikir Penelitian	30
Gambar 4. 1. Tren Tingkat Kemiskinan Kabupaten/Kota di Sulawesi Selatan (2010-2021)	43
Gambar 4. 2 Pertumbuhan Ekonomi Kab/Kota di Provinsi Sulawesi Selatan Periode 2010-2021.....	44
Gambar 4. 3 Gini Ratio Provinsi Sulawesi Selatan (2010-2021)	44
Gambar 4. 4. Perbandingan IPM Provinsi Sulawesi Selatan dan Indonesia Tahun 2010-2021 dan Tren Rata-rata IPM per Kabupaten/Kota Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2010-2021.....	46

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 2. 1 Kategori Kapasitas Fiskal Daerah	24
Tabel 4. 1. Indeks Kapasitas Fiskal Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Selatan Periode 2010-2021	48
Tabel 4. 2. Hasil Uji Chow.....	50
Tabel 4. 3. Hasil Uji Hausman.....	50
Tabel 4. 4. Uji Lagrange Multiplier.....	51
Tabel 4. 5. Hasil Estimasi Data Panel dengan <i>Random Effect Model</i>	51
Tabel 4. 6. Hasil Uji t.....	54
Tabel 4. 7. Hasil Uji F.....	55
Tabel 4. 8. Hasil Koefisien Determinasi	55
Tabel 4. 9. Hasil Uji Normalitas.....	56
Tabel 4. 10. Hasil Uji Multikolinearitas	56
Tabel 4. 11. Hasil Uji Heteroskedastisitas	57
Tabel 4. 12. Hasil Autokorelasi Uji Durbin Watson	57

DAFTAR LAMPIRAN

	Halaman
Lampiran 1. Statistik Deskriptif.....	79
Lampiran 2. Tabulasi Data Variabel.....	82
Lampiran 3. Biodata Peneliti	89

BAB I

PENDAHULUAN

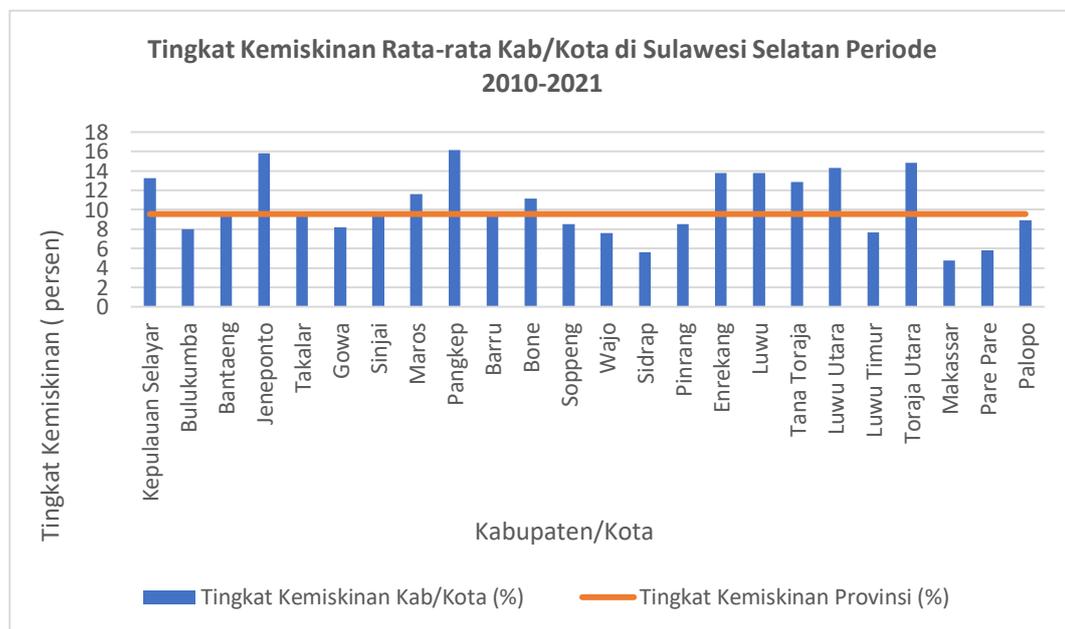
1.1. Latar Belakang

Kemiskinan menjadi salah satu penyakit dalam perekonomian di hampir semua negara, terlebih lagi di negara berkembang seperti Indonesia yang masih memiliki tingkat kemiskinan cukup tinggi dibandingkan dengan beberapa negara di sekitarnya. Melansir data Badan Pusat Statistik (BPS), tren penurunan kemiskinan 10 terakhir justru berbalik arah akibat Covid-19. Pada Maret 2020, tercatat sebanyak 31,02 juta penduduk miskin, yang setara dengan setara 13,08 persen dari total penduduk. Angkanya kemudian terus mengalami tren penurunan secara perlahan hingga tahun 2019, namun kembali melonjak pada Maret 2020 menjadi 26,42 juta orang, atau naik 9,78 persen dibandingkan dengan September 2019. Adapun sebelum kenaikan pada Maret 2020, kenaikan penduduk miskin terakhir terjadi pada Maret 2017, dengan jumlah kenaikan mencapai 27,77 juta orang atau meningkat 10,64 persen dibandingkan dengan September 2016 (BPS, 2021).

Permasalahan kemiskinan merupakan permasalahan yang kompleks dan bersifat multidimensional. Oleh karena itu, upaya-upaya pengentasan kemiskinan harus dilakukan secara benar, yang mencakup berbagai aspek kehidupan masyarakat dan dilaksanakan secara terpadu. Menurut Yacoub (2012) dalam penelitiannya menyatakan bahwa kemiskinan merupakan salah satu persoalan fundamental, karena kemiskinan menyangkut pemenuhan kebutuhan yang paling vital dalam kehidupan dan merupakan masalah yang dihadapi banyak negara, termasuk Indonesia. Melansir dari *World Bank* (2012), salah satu sebab kemiskinan adalah karena kurangnya pendapatan dan aset (lack of income and

assets) untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, perumahan, tingkat kesehatan dan pendidikan yang dapat diterima. Di samping itu, kemiskinan juga berkaitan dengan keterbatasan lapangan pekerjaan dan biasanya mereka yang dikategorikan miskin (the poor) tidak memiliki pekerjaan (pengangguran), serta tingkat pendidikan dan kesehatan yang pada umumnya tidak memadai.

Persoalan kemiskinan merupakan salah satu persoalan yang masih dihadapi oleh bangsa Indonesia saat ini, tak terkecuali di Provinsi Sulawesi Selatan. Meski menjadi salah satu provinsi dengan pertumbuhan ekonomi yang baik, angka kemiskinan di Sulawesi Selatan tergolong masih tinggi. Melansir data resmi yang dirilis oleh BPS (2021), selama periode 2010 hingga 2021 sebanyak 815,98 ribu jiwa penduduk Sulawesi Selatan hidup di bawah garis kemiskinan. Dalam hal ini, kinerja indikator ekonomi dalam pembangunan sangat diharapkan peranannya untuk menekan angka kemiskinan.



Sumber: BPS Provinsi Sulawesi Selatan, 2021.

Gambar 1. 1. Data Kemiskinan 24 Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2010-2021

Data pada **Gambar 1.1** menunjukkan jumlah penduduk miskin pada kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Selatan periode 2010-2021 yang cenderung berfluktuasi (BPS, 2021). Selama periode 2010-2021, rata-rata tingkat kemiskinan Provinsi Sulawesi Selatan tercatat sebesar 9,56 persen. Sementara terdapat 10 (sepuluh) kabupaten yang memiliki rata-rata tingkat kemiskinan di atas rata-rata tingkat kemiskinan provinsi, yaitu Kepulauan Selayar (13,24 persen), Kabupaten Jeneponto (15,83 persen), Kabupaten Maros (11,59 persen), Kabupaten Pangkep (16,16 persen), Kabupaten Bone (11,17 persen), Kabupaten Enrekang (13,77 persen), Kabupaten Luwu (13,77 persen), Kabupaten Tana Toraja (12,83 persen), Kabupaten Luwu Utara (14,29 persen), dan Kabupaten Toraja Utara (14,83 persen).

Semakin tinggi jumlah dan persentase penduduk miskin di suatu daerah tentu saja akan menjadi beban pembangunan, sehingga peran pemerintah dalam mengatasinya pun akan semakin besar. Alokasi dana APBN/APBD untuk program-program penanggulangan kemiskinan dapat dikatakan berhasil bila jumlah dan persentase penduduk miskin turun atau bahkan tidak ada. Namun, fakta yang ada mengindikasikan bahwa kebijakan penanggulangan kemiskinan senantiasa menjadi hal yang perlu dicermati dan dikaji ulang khususnya dalam penyusunan dan penerapan strategi serta program pengentasan kemiskinan yang dijalankan oleh pemerintah. Keberadaan jumlah penduduk miskin di beberapa kabupaten/kota di Sulawesi Selatan yang masih relatif besar, dapat menegaskan bahwa kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan yang diimplementasikan secara masif dalam beberapa tahun terakhir tampaknya tidak cukup efektif untuk memperbaiki taraf hidup penduduk miskin (Agussalim, 2012).

Dalam konteks ini, Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) dan berbagai program pengentasan kemiskinan dan langkah konstruktif lainnya

seperti pembentukan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD), menandatangani nota kesepahaman (MoU) antara pemerintah provinsi dengan pemerintah kabupaten/ kota untuk menurunkan angka kemiskinan 10 persen per tahun, mengimplementasikan kebijakan pendidikan dan kesehatan gratis, menempatkan pemenuhan hak-hak dasar sebagai substansi utama Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), dapat dinilai – atau setidaknya dipersepsi - belum berhasil di Provinsi Sulawesi Selatan. PNPM boleh jadi berhasil pada tataran output (memperbaiki saluran irigasi, jalan desa, lingkungan pemukiman, dan sebagainya), tetapi tentu saja tidak berhasil pada tataran *impact* yaitu mengurangi jumlah penduduk miskin (Agussalim, 2012).

Selama masa pandemi Covid-19, angka kemiskinan di Sulawesi Selatan mengalami peningkatan. Adanya imbauan untuk pembatasan aktivitas mengakibatkan terpuruknya berbagai sektor perekonomian dan berdampak terhadap pengurangan pekerja, yang menyebabkan masyarakat kehilangan mata pencaharian sehingga memicu peningkatan jumlah angka kemiskinan di Sulawesi Selatan. Melansir data dari Badan Pusat Statistik, jumlah penduduk miskin di Sulsel pada September 2020 sebesar 800,24 ribu jiwa, mengalami peningkatan sebesar 23,41 ribu jiwa dibanding maret 2020, atau meningkat 40,66 ribu jiwa dibanding September 2019. Persentase penduduk miskin pada September 2020 sebesar 8,99 persen, juga naik sebesar 0,27 poin dari Maret 2020. Begitu pun jika dibandingkan September 2019 yang meningkat sebanyak 40,66 ribu jiwa (BPS, 2021).

Adapun persentase penduduk miskin mengalami peningkatan, baik daerah perkotaan maupun perdesaan selama periode September 2019 sampai September 2020. Secara absolut, selama periode September 2019-September 2020, penduduk miskin di daerah perkotaan mengalami peningkatan 32,69 ribu

jiwa (0.70 persen). Sedangkan di daerah pedesaan, juga mengalami peningkatan sebesar 7,97 ribu jiwa atau sekitar 0.35 persen (BPS, 2021).

Menurut Arsyad (2010), kemiskinan dapat terjadi karena anggota masyarakat tidak atau belum berpartisipasi dalam proses perubahan yang disebabkan ketidakmampuan dalam kepemilikan faktor produksi atau kualitas yang kurang memadai. Sementara menurut Sen dalam Todaro dan Smith (2000), kemiskinan bukan suatu kondisi kekurangan suatu komoditi ataupun masalah kepuasan dari komoditi tersebut namun kemiskinan lebih cenderung merupakan kondisi masyarakat yang kurang dapat memaksimalkan fungsi dan mengambil manfaat dari komoditi tersebut.

Adapun penyebab kemiskinan menurut Sharp, et. al. (dalam Kuncoro, 2011:69) dipandang dari sisi ekonomi disebabkan oleh tiga faktor. Pertama, secara mikro, kemiskinan muncul karena adanya ketidaksamaan pola kepemilikan sumberdaya yang menimbulkan distribusi pendapat yang timpang. Penduduk miskin hanya memiliki sumberdaya dengan jumlah terbatas dan kualitas yang rendah. Kedua, kemiskinan muncul akibat perbedaan dalam kualitas sumber daya manusia. Kualitas sumberdaya manusia yang rendah berarti produktifitasnya rendah, yang pada gilirannya upah yang didapat juga rendah. Rendahnya kualitas sumber daya manusia ini karena rendahnya pendidikan, nasib yang kurang beruntung. Adanya diskriminasi, atau karena keturunan. Ketiga, kemiskinan muncul akibat perbedaan akses dalam modal. Ketiga penyebab kemiskinan ini bersumber dari teori lingkaran kemiskinan (*vicious circle of poverty*). Teori ini mengatakan "a poor country is poor because it is poor" yang artinya negara miskin karena dia miskin. Adanya keterbelakangan, ketidaksempurnaan pasar, dan kurangnya modal menyebabkan rendahnya produktivitas. Rendahnya produktivitas mengakibatkan rendahnya pendapatan yang diterima. Rendahnya

pendapatan ini akan berdampak pada rendahnya tabungan dan investasi. Maka dari itu, setiap tindakan untuk pengentasan kemiskinan seharusnya diarahkan untuk memotong lingkaran dan perangkap kemiskinan ini (Nurske, dalam Kuncoro 2006)

Terdapat beberapa penelitian sebelumnya yang membahas mengenai determinan kemiskinan. Salah satu studi empiris relevan dilakukan oleh Amijaya (2008) yang menyimpulkan bahwa variabel pertumbuhan ekonomi berpengaruh negatif terhadap tingkat kemiskinan, sedangkan variabel pengangguran berpengaruh positif terhadap tingkat kemiskinan. Penelitian yang dilakukan oleh Napitupulu (2007) tentang pengaruh indikator komposit Indeks Pembangunan Manusia terhadap penurunan jumlah penduduk miskin di Sumatera Utara menunjukkan bahwa angka harapan hidup, angka melek huruf, dan konsumsi perkapita mempunyai pengaruh negatif dan signifikan terhadap jumlah penduduk miskin di Sumatera Utara. Selanjutnya, Prayitno (2010) mengungkapkan bahwa variabel pertumbuhan ekonomi berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan, pendidikan berpengaruh negatif dan signifikan, serta pengangguran berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemiskinan di Jawa Tengah tahun 2003-2007.

Terdapat pula penelitian yang dilakukan oleh Agussalim (2012) di Provinsi Sulawesi Selatan dengan model eksplorasi kualitatif mendalam yang melihat determinan kemiskinan di Provinsi Sulawesi Selatan dengan metode pendekatan statistik inferensial. Penelitian sejenis juga dilakukan oleh Azwar dan Subekan (2016) mengenai determinan kemiskinan di Sulawesi Selatan yang mengungkapkan bahwa pertumbuhan ekonomi regional, jumlah pengangguran, indeks kesehatan, angka partisipasi sekolah, dan belanja daerah secara simultan berpengaruh signifikan terhadap jumlah kemiskinan di Provinsi Sulawesi Selatan.

Adapun penelitian ini menetapkan variabel kemiskinan sebagai variabel terikat yang dipengaruhi oleh beberapa variabel bebas yang telah ditetapkan oleh penulis, yaitu pertumbuhan ekonomi, ketimpangan pendapatan, Indeks Pembangunan Manusia, dan kapasitas fiskal. Pertumbuhan ekonomi yang tercermin dari besarnya output (PDRB) yang dihasilkan oleh suatu daerah diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam penurunan kemiskinan (Amijaya, 2008). Secara umum diketahui bahwa pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator keberhasilan pembangunan. Sedangkan tujuan yang paling penting dari suatu pembangunan adalah pengurangan tingkat kemiskinan yang dapat dicapai melalui pertumbuhan ekonomi dan/atau melalui redistribusi pendapatan (Kakwani dan Son, 2003). Hal ini dilandasi pada teori *trickle-down effect* dimana pertumbuhan ekonomi dengan sendirinya akan berdampak pada penciptaan lapangan kerja dan pembangunan ekonomi.

Kemudian, tinggi rendahnya tingkat kemiskinan di suatu negara turut dipengaruhi oleh kesenjangan distribusi pendapatan. Sebagian besar keluarga miskin memiliki jumlah anggota keluarga yang banyak sehingga kondisi perekonomian mereka yang berada di garis kemiskinan semakin memburuk seiring dengan memburuknya ketimpangan pendapatan atau kesejahteraan (Todaro, 2000). Hubungan antara kesenjangan dan kemiskinan merupakan hubungan yang pragmatis, yaitu bahwa kesenjangan menyebabkan kemiskinan semakin parah atau kesenjangan adalah bentuk dari kemiskinan (Sugiyarto et al, 2015).

Variabel independen selanjutnya adalah Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang dibangun melalui pendekatan tiga dimensi dasar yang mencakup kesehatan, pendidikan, dan kehidupan yang layak. Menurut Susiati (2012), kemampuan untuk keluar dari kemiskinan ditentukan oleh kualitas sumber daya

manusia. Kualitas sumber daya manusia tinggi yang tercermin dari tingkat pendidikan dan kesehatan yang tinggi akan mendorong produktivitas sehingga tingkat pendapatan pun meningkat. Tingkat pendidikan, tingkat kesehatan, dan tingkat pendapatan yang tinggi akan tercermin pada IPM yang tinggi. Oleh karena itu, upaya meningkatkan kualitas pembangunan manusia baik dari aspek pendidikan, kesehatan, dan ekonomi perlu terus dilakukan untuk mengurangi tingkat kemiskinan.

Selain itu, kapasitas fiskal di suatu daerah dapat mendorong pertumbuhan ekonomi suatu daerah, sebab minimnya intervensi dalam hal kebijakan terkait dengan pengelolaan daerah yang selanjutnya akan mengurangi tingkat pengangguran dan menurunkan kemiskinan pada daerah tersebut. Kapasitas fiskal yang baik menunjukkan kemampuan pemerintah dalam mengalokasikan anggaran untuk kepentingan masyarakat miskin (Kanbur dan Squire, 1999).

Dari penjelasan dan pemaparan di atas, diketahui bahwa seiring perkembangan kinerja indikator ekonomi yang mencakup empat variabel di atas ternyata belum mampu memberikan dampak penurunan yang signifikan terhadap kemiskinan di Provinsi Sulawesi Selatan. Hal ini terbukti dari beberapa tahun terakhir kemiskinan justru mengalami perlambatan penurunan dengan tren yang fluktuatif bahkan mengalami peningkatan di beberapa tahun.

Oleh karena itu, dengan gambaran latar belakang yang ada, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat kemiskinan pada kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Selatan, dengan alasan bahwa provinsi ini merupakan salah satu representasi utama perekonomian Indonesia bagian timur. Penelitian ini juga memasukkan variabel kapasitas fiskal sebagai salah satu variabel independen, mengingat masih sedikit penelitian sebelumnya yang menganalisis pengaruh kapasitas fiskal terhadap

tingkat kemiskinan khususnya pada kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Selatan.

Hasil yang diperoleh dari penelitian ini diharapkan dapat menjelaskan fenomena kemiskinan yang terjadi pada kabupaten/kota di Sulawesi Selatan selama periode 2010-2021 karena pengaruh dari variabel-variabel tersebut di atas dan melahirkan rekomendasi-rekomendasi kebijakan terkait topik penelitian. Selain itu, hasil penelitian ini juga diharapkan dapat menguatkan dan mendukung hasil penelitian sebelumnya, khususnya penelitian yang dilakukan di wilayah yang sama serta menambah referensi penelitian berikutnya dalam bidang keuangan publik, khususnya dalam kajian terkait penanggulangan kemiskinan di daerah.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka pertanyaan penelitian dalam skripsi ini antara lain:

1. Apakah pertumbuhan ekonomi berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan pada kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Selatan?
2. Apakah ketimpangan pendapatan berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan pada kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Selatan?
3. Apakah Indeks Pembangunan Manusia berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan pada kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Selatan?
4. Apakah kapasitas fiskal berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan pada kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Selatan?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah di atas maka tujuan yang akan dicapai dalam penelitian ini, yaitu :

1. Untuk menganalisis pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap tingkat kemiskinan pada kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Selatan.

2. Untuk menganalisis pengaruh ketimpangan pendapatan terhadap tingkat kemiskinan pada kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Selatan.
3. Untuk menganalisis pengaruh Indeks Pembangunan Manusia terhadap tingkat kemiskinan pada kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Selatan.
4. Untuk menganalisis pengaruh kapasitas fiskal terhadap tingkat kemiskinan pada kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Selatan.

1.4. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat berguna dan memberi kontribusi bagi :

1. Pengambil kebijakan: diharapkan penelitian ini dapat memberikan informasi yang berguna dalam memahami faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat kemiskinan di Sulawesi Selatan sehingga dapat diketahui kebijakan yang perlu diterapkan untuk mengatasi masalah kemiskinan yang ada.
2. Masyarakat umum: diharapkan penelitian ini dapat memperkaya khazanah ilmu pengetahuan ekonomi, khususnya ekonomi pembangunan. Manfaat khusus bagi ilmu pengetahuan yaitu dapat melengkapi kajian mengenai tingkat kemiskinan dengan mengungkap secara empiris faktor-faktor yang mempengaruhinya.
3. Mahasiswa: diharapkan penelitian ini dapat menambah pengetahuan terkait faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat kemiskinan pada kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Selatan serta sebagai bahan referensi bagi peneliti selanjutnya yang tertarik meneliti topik kemiskinan di daerah lain.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Landasan Teori

2.1.1. Kemiskinan

Kemiskinan menurut *World Bank* merupakan keadaan dimana seorang individu atau kelompok tidak memiliki pilihan atau peluang untuk meningkatkan taraf hidupnya guna menjalani kehidupan yang sehat dan lebih baik sesuai standar hidup, memiliki harga diri, dan dihargai oleh sesamanya. Adapun standar rasio tingkat kemiskinan yang ditetapkan oleh *World Bank* sebesar \$2/day atau sekitar Rp 22,000.00/hari.

World Bank juga mengelompokkan karakteristik penduduk miskin menurut komunitas, wilayah, rumah tangga, dan individu. Pada faktor komunitas, infrastruktur merupakan determinan utama kemiskinan. Keadaan infrastruktur sangat erat kaitannya dengan tingkat kesejahteraan masyarakat. Infrastruktur yang baik akan memudahkan masyarakat untuk melakukan aktivitas ekonomi maupun sosial kemasyarakatan serta memudahkan investor untuk melakukan investasi di daerah yang bersangkutan. Indikator pembangunan infrastruktur yang penting adalah saluran irigasi, akses listrik, dan kondisi jalan utama transportasi. Indikator lain dari karakteristik faktor komunitas adalah akses yang sama terhadap usaha atau pekerjaan seperti keberadaan lembaga keuangan dan industri (World Bank, 2012).

Todaro (2000) mengungkapkan besarnya kemiskinan dapat diukur dengan atau tanpa mengacu kepada garis kemiskinan (*poverty line*). Konsep yang mengacu kepada garis kemiskinan disebut kemiskinan absolut, sedangkan konsep yang pengukurannya tidak didasarkan pada garis kemiskinan disebut kemiskinan

relatif. Kemiskinan absolut adalah sejumlah penduduk yang tidak mampu mendapatkan sumber daya yang cukup untuk memenuhi kebutuhan dasar, mereka hidup dibawah tingkat pendapatan riil minimum tertentu atau dibawah “garis kemiskinan internasional”, garis tersebut tidak mengenal batas antar negara, dan juga memperhitungkan perbedaan tingkat harga antar negara dengan mengukur penduduk miskin sebagai orang yang hidup kurang dari US\$ 1 atau \$2 per-hari dalam Paritas Daya Beli (PPP) sedangkan, kemiskinan relatif adalah suatu ukuran mengenai kesenjangan di dalam distribusi pendapatan, biasanya dapat didefinisikan di dalam kaitannya dengan tingkat rata-rata dari distribusi yang dimaksud.

Suparlan (2004) mendefinisikan bahwa kemiskinan adalah keadaan serba kekurangan harta dan benda berharga yang diderita oleh seseorang atau sekelompok orang yang hidup dalam lingkungan serba miskin atau kekurangan modal, baik dalam pengertian uang, pengetahuan, kekuatan sosial, politik, hukum, maupun akses terhadap fasilitas pelayanan umum, kesempatan berusaha dan bekerja. Lebih jauh lagi, kemiskinan berarti suatu kondisi di mana orang atau kelompok orang tidak mempunyai kemampuan, kebebasan, aset dan aksesibilitas untuk kebutuhan mereka di waktu yang akan datang, serta sangat rentan (vulnerable) terhadap resiko dan tekanan yang disebabkan oleh penyakit dan peningkatan secara tiba-tiba atas harga-harga bahan makanan dan uang sekolah (UNCHS, 1996; Pandji, 2001).

Menurut Kartasmita (1996), ada 4 faktor penyebab kemiskinan, antara lain (1) rendahnya tingkat pendidikan yang menyebabkan pengembangan diri yang terbatas; (2) rendahnya tingkat pendidikan, tingkat kesehatan, dan tingkat gizi yang menyebabkan daya tahan fisik dan daya pikir menjadi rendah sehingga menurunkan produktivitas; (3) terbatasnya lapangan kerja, serta (4) kondisi

keterisolasian, yang mana kondisi terpencil atau terisolasi menyebabkan penduduk tidak mampu menjalankan kegiatan perekonomian secara optimal. Selanjutnya, Hadiwegono dan Pakpahan (1993) menjelaskan bahwa kemiskinan disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain sumber daya alam yang rendah, teknologi dan unsur penduduk yang rendah, sumber daya manusia yang rendah, serta sarana dan prasarana termasuk kelembagaan yang belum baik.

Lingkaran perangkap kemiskinan (*the vicious circle of poverty*) atau biasa disingkat perangkap kemiskinan, adalah serangkaian kekuatan yang saling mempengaruhi secara sedemikian rupa sehingga menimbulkan keadaan di mana sesuatu negara akan tetap miskin dan akan tetap mengalami banyak kesukaran untuk mencapai tingkat pembangunan yang lebih tinggi. Teori ini terutama dikaitkan kepada Nurkse, seorang ahli ekonomi yang memulai pengkajian mengenai masalah pembentukan modal di negara berkembang.

Ditinjau dari kelompok sasaran, terdapat beberapa tipe kemiskinan. Penggolongan tipe kemiskinan ini dimaksudkan agar setiap tujuan program memiliki sasaran dan target yang jelas. Sumodiningrat (1999) membagi kemiskinan menjadi tiga kategori, yaitu kemiskinan absolut (pendapatan di bawah garis kemiskinan dan tidak dapat memenuhi kebutuhan dasarnya), kemiskinan relatif (situasi kemiskinan di atas garis kemiskinan berdasarkan pada jarak antara miskin dan non-miskin dalam suatu komunitas), serta kemiskinan struktural (kemiskinan ini terjadi saat orang atau kelompok masyarakat enggan untuk memperbaiki kondisi kehidupannya sampai ada bantuan untuk mendorong mereka keluar dari kondisi tersebut).

United Nation Development Program (UNDP) meninjau kemiskinan dari dua sisi, yaitu dari sisi pendapatan dan kualitas manusia. Dilihat dari sisi pendapatan, kemiskinan ekstrim (*extreme poverty*) atau kemiskinan absolut

adalah kekurangan pendapatan untuk keperluan pemenuhan kebutuhan dasar atau kebutuhan minimal kalori yang diperlukan. Dari sisi kualitas manusia, kemiskinan secara umum (*overall poverty*), atau sering disebut sebagai kemiskinan relatif, adalah kekurangan pendapatan untuk memenuhi kebutuhan non-pangan, seperti pakaian, energi, dan tempat bernaung (UNDP, 2000).

Penggolongan tipe kemiskinan lainnya adalah kemiskinan persisten, yaitu situasi di mana orang atau keluarga secara konsisten tetap miskin untuk masa yang relatif lama. Sedangkan kemiskinan transien adalah situasi dimana kehidupan orang atau keluarga secara temporer dapat jatuh di bawah garis kemiskinan bila terjadi PHK, jatuh sakit, dan peningkatan biaya pendidikan (Pandji, 2001). Kondisi kemiskinan transien dapat ditemui pada saat suatu negara yang dilanda krisis ekonomi atau bencana alam. Tinjauan lain mengenai kemiskinan adalah garis kemiskinan (*poverty line*) dan ukuran kemiskinan (*poverty measurement*), yang merupakan indikator kuantitatif untuk menentukan individu atau kelompok masyarakat miskin.

Landasan teori tentang kemiskinan dalam penelitian ini menggunakan konsep Badan Pusat Statistik, dimana kemiskinan merupakan keadaan seorang individu atau sekelompok orang yang tidak mampu memenuhi kebutuhan dasarnya, seperti makanan, pakaian, tempat berlindung, pendidikan, dan kesehatan yang dianggap sebagai kebutuhan minimal dan memiliki standart tertentu. Pengukuran tingkat kemiskinan dalam penelitian ini menggunakan ukuran standar hidup layak yang ditetapkan oleh Badan Pusat Statistik pada tahun 2012 yaitu sebesar Rp 355,740.00/bulan, dengan kata lain, per individu memiliki penghasilan kurang lebih sebesar Rp 11,000.00/hari.

Adisasmita (2015) menjelaskan beberapa indikator kemiskinan yang digunakan secara umum adalah tingkat upah, pendapatan, konsumsi, mortalitas

anak usia balita, imunisasi, kekurangan gizi anak, tingkat fertilitas, tingkat kematian ibu, harapan hidup rata-rata, tingkat penyerapan anak usia sekolah dasar, proporsi pengeluaran pemerintah untuk pelayanan kebutuhan dasar masyarakat, pemenuhan bahan pangan (kalori/protein), air bersih, perkembangan penduduk, melek huruf, urbanisasi, pendapatan per kapita, dan distribusi pendapatan. Tolok ukur kemiskinan bukan hanya hidup dalam kekurangan pangan dan tingkat pendapatan yang rendah, akan tetapi melihat tingkat kesehatan, pendidikan dan perlakuan adil di muka hukum dan sebagainya (Adisasmita, 2015).

2.1.2. Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi menurut Boediono (1999) merupakan proses peningkatan kapasitas produksi dalam suatu perekonomian secara berkesinambungan menuju ke arah yang lebih baik yang diwujudkan dalam bentuk kenaikan pendapatan nasional (Produk Domestik Bruto) maupun pendapatan daerah (Produk Domestik Regional Bruto) dalam jangka panjang.

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) menurut Badan Pusat Statistik merupakan jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit produksi, baik berupa barang dan jasa dalam suatu wilayah. Produk Domestik Regional Bruto terdiri dari dua macam cara penyajian, yaitu PDRB atas dasar harga berlaku dan PDRB atas dasar harga konstan. PDRB atas dasar harga berlaku atau PDRB nominal merupakan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga pada tahun berjalan (*current price*), baik pada saat menghitung atau menilai produksi, biaya antara, ataupun nilai tambah. Sedangkan PDRB atas dasar harga konstan atau dikenal juga dengan PDRB riil merupakan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga pada tahun tertentu yang digunakan sebagai acuan atau tahun dasar, baik pada saat menghitung atau menilai produksi, biaya antara, maupun komponen nilai tambah.

Pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap pengurangan kemiskinan dilakukan oleh Rustam (2010) yang menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi berpengaruh negatif signifikan terhadap tingkat kemiskinan. Namun, penelitian oleh Barika (2013) justru mengungkapkan bahwa pertumbuhan ekonomi tidak berpengaruh terhadap kemiskinan. Hal ini mengindikasikan bahwa pertumbuhan ekonomi yang ada lebih banyak ditopang oleh konsumsi daripada investasi atau modal. Pertumbuhan ekonomi yang tidak berpengaruh tersebut mencerminkan kurangnya kualitas pertumbuhan ekonomi yang ada karena belum mampu dalam mengurangi kemiskinan.

2.1.3. Ketimpangan Pendapatan

Ketimpangan pendapatan adalah suatu kondisi dimana distribusi pendapatan yang diterima masyarakat tidak merata. Ketimpangan ditentukan oleh tingkat pembangunan, heterogenitas etnis, ketimpangan juga berkaitan dengan kediktatoran dan pemerintah yang gagal menghargai *property rights* (Glaeser, 2006). Alesina dan Rodrik (1994) menyatakan bahwa ketimpangan pendapatan akan menghambat pertumbuhan. Hal ini karena ketimpangan menyebabkan kebijakan redistribusi pendapatan yang tentunya akan mahal. Todaro (2000) menyatakan bahwa ketimpangan pendapatan akan menyebabkan beberapa hal, antara lain inefisiensi ekonomi dan instabilitas.

Permasalahan ketimpangan pendapatan tidak dapat dipisahkan dari permasalahan kemiskinan. Salah satu perhatian utama di negara-negara miskin adalah masalah pertumbuhan versus distribusi pendapatan (Putra, 2011). Menurut Todaro (2000), tinggi rendahnya tingkat kemiskinan di suatu negara tergantung pada dua faktor utama, yaitu tingkat pendapatan nasional rata-rata dan besarnya kesenjangan distribusi pendapatan. Setinggi apa pun tingkat pendapatan nasional per kapita yang dicapai oleh suatu negara, selama distribusinya tidak

merata, maka tingkat kemiskinan di negara tersebut pasti akan tetap parah. Demikian sebaliknya, jika tingkat pendapatan nasional rata-ratanya rendah, maka akan berpengaruh pada tingkat kesejahteraan masyarakat yang menurun.

Menurut Todaro (2000), PDRB per kapita di suatu daerah mencerminkan rata-rata kemampuan pendapatan masyarakat untuk memenuhi kebutuhannya terutama kebutuhan pokok. Pemenuhan kebutuhan pokok masyarakat merupakan salah satu indikasi kesejahteraan yang berasal dari aspek pemerataan pendapatan masyarakat di daerah. Tingkat kemiskinan tidak hanya berhubungan dengan kemampuan pendapatan, akan tetapi juga berhubungan dengan pemerataan pendapatan masyarakat di suatu daerah.

Konsep distribusi pendapatan dapat dibedakan menurut dua aliran ekonomi, yaitu mazhab klasik dan mazhab strukturalis. Pandangan pertama dari Mazhab klasik berpegang pada konsep keseimbangan alokasi sumberdaya dan konsep pasar bebas, di mana harga menjadi acuan dalam proses pertukaran. Perbedaan kondisi antar sektor akan menyebabkan pertukaran dan alokasi sumberdaya yang efisien tanpa campur tangan pemerintah hingga mencapai pareto optimum. Sedangkan mazhab strukturalis memandang perkembangan ekonomi sebagai transisi yang ditandai oleh suatu transformasi yang mengandung perubahan mendasar pada ekonomi yang disebut sebagai perubahan mendasar struktural. Menurut Todaro (2000) bahwa dalam mengukur distribusi pendapatan diukur dari 2 ukuran pokok yaitu, distribusi pendapatan pribadi atau distribusi pendapatan personal dan distribusi fungsional yang mempertimbangkan individu sebagai totalitas yang terpisah - pisah.

Salah satu cara untuk mengukur tingkat ketimpangan distribusi pendapatan adalah Kurva Lorenz yang menunjukkan hubungan kuantitatif persentase penduduk dengan persentase pendapatan yang diterima dalam kurun

waktu setahun. Semakin jauh kurva Lorenz dari garis diagonal (kemerataan sempurna), semakin tinggi derajat ketimpangan yang dialami oleh penduduk dalam suatu wilayah. Apabila kurva Lorenz makin mendekati garis diagonal maka semakin rendah derajat ketimpangannya. Ketimpangan pendapatan dapat diukur menggunakan Gini Ratio. Nilai ketidakmerataan terletak antara 0 (kemerataan sempurna) sampai 1 (ketidakmerataan sempurna). Koefisien Gini ketidakmerataan sedang berkisar antara 0,36-0,49, ketidakmerataan tinggi berkisar 0,50-0,70, dan ketidakmerataan rendah berkisar antara 0,20-0,35 (Arsyad, 2010).

Terkait dengan kesejahteraan masyarakat, Daniel Suryadarma, dkk (2005) dalam penelitiannya berjudul *A Reassessment of Inequality and Its Role in Poverty Reduction in Indonesia*, menyimpulkan bahwa tingkat kemiskinan masyarakat menurun dengan cepat antara tahun 1999 dan 2002 yang disebabkan karena ketimpangan pendapatan selama krisis yang rendah. Hasil ini sejalan dengan penelitian Rustariyuni (2014) bahwa Gini Ratio memiliki korelasi positif terhadap kesejahteraan masyarakat, artinya jika ketimpangan pendapatan meningkat akan berpengaruh pada peningkatan kesejahteraan masyarakat dan penurunan kemiskinan.

2.1.4. Indeks Pembangunan Manusia

Todaro (2000) menjelaskan bahwa pembangunan manusia merupakan tujuan pembangunan itu sendiri, yang memainkan peranan kunci agar tercipta pembangunan yang berkelanjutan dan kesejahteraan masyarakat. Sebagian dari upaya pemerintah untuk menyejahterakan masyarakatnya adalah dengan menyediakan sarana dan prasarana untuk kelompok masyarakat miskin. Hal ini dilakukan pemerintah dengan membangun infrastruktur seperti jalan, penyediaan air bersih, sarana kesehatan, dan sarana pendidikan.

Indikator kesejahteraan masyarakat digambarkan melalui Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang diperkenalkan pertama kali pada tahun 1990 oleh United Nations Development Programme (UNDP). IPM mencakup tiga komponen yang dianggap mendasar bagi manusia dan secara operasional mudah dihitung untuk menghasilkan suatu ukuran yang merefleksikan upaya pembangunan manusia. Ketiga komponen tersebut adalah peluang hidup (longevity), pengetahuan (knowledge), dan hidup layak (living standards). Peluang hidup menunjukkan jumlah tahun hidup yang diharapkan dapat dinikmati penduduk suatu wilayah yang dihitung berdasarkan angka harapan hidup ketika lahir; pengetahuan diukur berdasarkan rata-rata lama sekolah dan angka melek huruf penduduk berusia 15 tahun ke atas; dan hidup layak diukur dengan pengeluaran per kapita yang didasarkan pada paritas daya beli (purchasing power parity).

Teori pertumbuhan baru menekankan pentingnya peranan pemerintah terutama dalam meningkatkan IPM serta mendorong penelitian dan pengembangan untuk meningkatkan produktivitas manusia. Upaya tersebut diwujudkan dalam bentuk investasi pendidikan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, khususnya peningkatan pengetahuan dan keterampilan seseorang. Semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang, maka pengetahuan dan keahliannya akan meningkat sehingga akan mendorong peningkatan produktivitas kerjanya. Perusahaan akan memperoleh hasil yang lebih banyak dengan mempekerjakan tenaga kerja dengan produktivitas yang tinggi, sehingga perusahaan juga akan memberikan gaji yang lebih tinggi kepada tenaga kerja bersangkutan.

Rendahnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM) akan berakibat pada rendahnya produktivitas kerja dari penduduk. Produktivitas yang rendah

selanjutnya akan berakibat pada rendahnya perolehan pendapatan yang kemudian akan menyebabkan tingginya jumlah penduduk miskin. Menurut Todaro (2000), modal manusia (pendidikan dan kesehatan) berkontribusi langsung terhadap kesejahteraan. Peningkatan kesehatan dan pendidikan dapat membantu keluarga untuk keluar dari jebakan lingkaran setan kemiskinan, karena dengan pendidikan dan kesehatan yang lebih baik, produktivitas dan pendapatan yang lebih tinggi akan lebih mudah dicapai.

Di sektor informal seperti pertanian, peningkatan keterampilan dan keahlian tenaga kerja akan mampu meningkatkan hasil pertanian, karena tenaga kerja yang terampil mampu bekerja lebih efisien. Pada akhirnya seseorang yang memiliki produktivitas yang tinggi akan memperoleh kesejahteraan yang lebih baik, yang diperlihatkan melalui peningkatan pendapatan maupun konsumsinya.

Rendahnya produktivitas kaum miskin dapat disebabkan oleh rendahnya akses mereka untuk memperoleh pendidikan (Kanbur dan Squire, 1999). Orang miskin menggunakan tenaga mereka untuk berpartisipasi dalam pertumbuhan ekonomi, tetapi kemiskinan – akibat kurangnya pendidikan, serta gizi dan kesehatan yang buruk – mengurangi kapasitas mereka untuk bekerja. Dengan demikian, rendahnya IPM membuat orang miskin tidak dapat mengambil manfaat atas pertumbuhan ekonomi yang terjadi. Oleh karena itu, penyediaan pelayanan sosial dasar merupakan unsur penting dalam penanganan kemiskinan.

Penelitian terdahulu mengenai pengaruh IPM terhadap kemiskinan dilakukan oleh Lanjouw, et al. (dalam Saputra, 2011) yang menyatakan bahwa pembangunan manusia di Indonesia identik dengan pengurangan kemiskinan. Investasi di bidang pendidikan dan kesehatan akan lebih berarti bagi penduduk miskin dibandingkan penduduk tidak miskin, karena bagi penduduk miskin aset utama adalah tenaga kasar mereka. Adanya fasilitas pendidikan dan kesehatan

yang murah akan sangat membantu untuk meningkatkan produktivitas tenaga kerja kasar, dan pada akhirnya meningkatkan pendapatan.

Hal ini selaras dengan penelitian Kanbur dan Squire (1999) bahwa tingkat kesehatan dan pendidikan dapat mempengaruhi kemiskinan. Perbaikan di bidang kesehatan yang dilakukan pemerintah dapat meningkatkan kesehatan masyarakat, sehingga anak-anak usia sekolah dapat bersekolah dan menerima pelajaran dengan baik. Lebih lanjut, penguatan kapasitas pendidikan akan menunjang produktivitas di masa yang akan datang serta berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi dan peningkatan pendapatan.

2.1.5. Kapasitas Fiskal

Permasalahan kemiskinan sangat menuntut adanya peran pemerintah yang lebih dalam penanggulangannya. Karena di dalam Undang-Undang Dasar 1945 pada pasal 27 adalah amanat yang harus diemban oleh pemerintah, bahwa tiap warga negara Indonesia berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak. Hal ini sudah menjadi konsekuensi pemerintah untuk bertanggung jawab terhadap kondisi masyarakat yang harus mendapatkan kesejahteraan yang berarti salah satunya adalah terlepas dari belenggu kemiskinan yang menghimpit dan menyulitkan untuk memenuhi kebutuhan dasar hidupnya. Dengan kata lain, pengeluaran pemerintah harus mampu menjawab permasalahan kemiskinan di masyarakat (Dumairy, 1996).

Adanya desentralisasi dan otonomi daerah menuntut pemerintah daerah untuk mampu mengalokasikan sejumlah besar anggaran pembangunan untuk membiayai program-program yang terkait dengan pengurangan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan masyarakatnya. Diterbitkannya Undang-undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah mengakibatkan terjadinya perubahan mendasar dalam pengaturan pemerintahan daerah di Indonesia. Berdasarkan

Undang-undang tersebut, otonomi diberikan kepada daerah kabupaten dan kota untuk membentuk dan melaksanakan kebijakan menurut prakarsa dan aspirasi masyarakatnya. Kondisi ini mendorong upaya partisipasi masyarakat yang akan mempengaruhi komponen kualitas pemerintah lainnya dan akhirnya menyebabkan orientasi pemerintah pada tuntutan dan pelayanan publik.

Desentralisasi fiskal diyakini akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, karena adanya kebutuhan masyarakat daerah terhadap pendidikan dan barang publik pada umumnya akan terpenuhi dengan lebih baik dibandingkan bila diatur langsung oleh pemerintah pusat. Akan tetapi, kecenderungan tersebut masih belum nampak. Hal ini disebabkan sebagian besar Pemerintah Daerah (Pemda dan DPRD) Kota dan Kabupaten di Indonesia merespon desentralisasi fiskal dengan menggenjot PAD melalui pajak dan retribusi tanpa diimbangi dengan peningkatan efektivitas pengeluaran APBD serta dampaknya terhadap pertumbuhan ekonomi.

Selain itu, Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, merupakan salah satu peraturan operasional dalam implementasi Otonomi Daerah. PP ini telah mendorong daerah-daerah untuk melakukan perubahan dan perbaikan dalam manajemen dan pengelolaan keuangan daerah. Dengan manajemen keuangan daerah yang sehat diharapkan transparansi dan akuntabilitas pemerintah daerah di bidang keuangan akan lebih terukur. Upaya ini harus mendapat dukungan dari semua pihak karena merupakan salah satu tuntutan reformasi yang menekankan pada upaya penyelenggaraan pemerintah yang bersih (clean government) dan tata pemerintahan yang baik (good governance).

Adapun kapasitas fiskal merupakan gambaran kemampuan keuangan masing-masing daerah yang dicerminkan melalui penerimaan umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (tidak termasuk dana alokasi khusus, dana darurat, dana pinjaman lama, dan penerimaan lain yang penggunaannya dibatasi untuk membiayai pengeluaran tertentu) untuk membiayai tugas pemerintahan setelah dikurangi belanja pegawai dan dikaitkan dengan jumlah penduduk miskin (Kemenkeu, 2014). Dalam hal ini, kapasitas fiskal menunjukkan kemampuan daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar pajak dan retribusi sebagai sumber pendapatan yang diperlukan daerah.

Dalam menjalankan perannya, pemerintah Indonesia sudah memberikan kewenangan tiap daerah dengan adanya Undang-Undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah untuk memberikan keluasaan pada tiap daerah dalam menjalankan roda pemerintahannya. Hal ini memberikan warna baru pada perekonomian daerah untuk memaksimalkan kebutuhan pendapatan daerahnya agar mampu memiliki kapasitas fiskal yang besar, karena sebelumnya banyak daerah yang mengalami kekurangan dalam hal kemampuan fiskal untuk membiayai pembangunan sosial ekonomi di masing-masing daerah.

Untuk memaksimalkan kebutuhan fiskal tiap daerah, pemerintah daerah telah memiliki keluasaan dalam Undang-Undang nomor 33 tahun 2004 tentang perimbangan keuangan pemerintah pusat dan daerah. Ini menjadi sebuah nuansa baru dan sekaligus menjadi tantangan untuk pemerintah daerah agar dapat mandiri dalam menggali potensi daerah dan mampu meningkatkan penerimaan daerah serta memaksimalkan kebutuhan fiskal daerah masing-masing untuk dapat melaksanakan program-program pemerintah daerah dalam hal memberikan pelayanan publik untuk kesejahteraan pada masyarakatnya.

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 107/PMK.07/2018, indeks kapasitas fiskal daerah kabupaten/kota dikelompokkan dalam 5 (lima) kategori kapasitas fiskal daerah sebagai berikut:

Rentang Indeks Kapasitas Fiskal Daerah (IKFD)	Kategori Kapasitas Fiskal Daerah
IKFD < 0,548	Sangat Rendah
0,548 < IKFD < 0,770	Rendah
0,770 < IKFD < 1,137	Sedang
1,137 < IKFD < 2,021	Tinggi
IKFD >2,021	Sangat Tinggi

Tabel 2. 1 Kategori Kapasitas Fiskal Daerah

Jika melihat data Indeks Kapasitas Fiskal dari tahun 2010-2021, seluruh kabupaten/kota di Sulawesi Selatan mengalami fluktuasi dalam kurun waktu sebelas tahun terakhir, bahkan beberapa kabupaten/kota mengalami penurunan yang begitu drastis dalam periode tersebut. Ini menandakan bahwa kapasitas fiskal yang dimiliki oleh Provinsi Sulawesi Selatan mengalami ketidakstabilan dalam penerimaan daerah untuk membiayai pembangunan yang direncanakan oleh pemerintah daerah. Idealnya, setiap provinsi harus menaikan kapasitas fiskal tiap daerah, mengingat semakin besar kapasitas fiskal yang dihasilkan oleh pemerintah daerah, maka semakin besar pula anggaran yang akan digunakan oleh pemerintah daerah untuk melakukan pengeluaran dalam melaksanakan pembangunan daerah.

Studi empiris terkait pengaruh kapasitas fiskal terhadap kemiskinan di antaranya dilakukan oleh oleh Rauf (2016), Franciari dan Sugiyanto (2013), dan Sriyana (2015) yang mengungkapkan adanya pengaruh antara kapasitas fiskal dengan kemiskinan. Di sisi lain, penelitian yang dilakukan oleh Pou, et al. (2015) mengemukakan hal lain, yaitu tidak adanya pengaruh yang signifikan antara kapasitas fiskal dengan kemiskinan.

2.2. Hubungan Antar Variabel

2.2.1. Hubungan Kemiskinan dengan Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi dapat berdampak positif bagi pengurangan kemiskinan jika pertumbuhan ekonomi yang terjadi berpihak pada penduduk miskin. Siregar (2006) juga menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi merupakan syarat keharusan (*necessary condition*) bagi pengurangan kemiskinan, sedangkan syarat kecukupannya (*sufficient condition*) adalah pertumbuhan ekonomi tersebut harus efektif dalam mengurangi kemiskinan. Artinya, pertumbuhan hendaklah menyebar di setiap golongan pendapatan, termasuk di golongan penduduk miskin (*growth with equity*). Secara langsung, hal ini berarti pertumbuhan itu perlu dipastikan terjadi di sektor-sektor dimana penduduk miskin bekerja (pertanian atau sektor yang padat karya). Adapun secara tidak langsung, perlu adanya kebijakan yang cukup efektif untuk meredistribusi manfaat pertumbuhan.

2.2.2. Hubungan Kemiskinan dengan Ketimpangan Pendapatan

Penyebab utama kemiskinan suatu rumah tangga salah satunya adalah rendahnya pendapatan yang mereka terima (Rahayu et al., 2013; Hidir & Jonyanis, 2017). Dalam perspektif lain bahwa dimensi kemiskinan dapat dipandang melalui sisi ketimpangan yang terjadi di suatu kelompok masyarakat, utamanya pada kelompok yang tergolong miskin dengan masyarakat lain (Sen, 1981). Sebagian besar keluarga miskin memiliki jumlah anggota keluarga yang banyak sehingga kondisi perekonomian mereka yang berada di garis kemiskinan semakin memburuk seiring dengan memburuknya ketimpangan pendapatan atau kesejahteraan (Todaro, 2000). Hubungan antara kesenjangan dan kemiskinan merupakan hubungan yang pragmatis, yaitu bahwa kesenjangan menyebabkan kemiskinan semakin parah atau kesenjangan adalah bentuk dari kemiskinan (Sugiyarto et al, 2015).

2.2.3. Hubungan Kemiskinan dengan Indeks Pembangunan Manusia

Salah satu terjadinya kenaikan angka kemiskinan juga dipengaruhi oleh Sumber Daya Manusia (SDM) yang tidak berkualitas. Salah satu tolok ukur yang digunakan dalam melihat kualitas hidup manusia adalah indeks pembangunan manusia. Badan Pusat Statistik menyatakan IPM dibangun melalui pendekatan tiga dimensi dasar yang mencakup kesehatan, pendidikan, dan kehidupan yang layak. Melalui peningkatan ketiga indikator tersebut diharapkan akan terjadi peningkatan kualitas hidup manusia, sehingga diharapkan angka kemiskinan akan menurun. Peningkatan pada sektor kesehatan dan pendidikan serta pendapatan per kapita memberikan kontribusi bagi pembangunan manusia, sehingga semakin tinggi kualitas manusia akan mengurangi jumlah penduduk miskin di daerah tersebut.

2.2.4. Hubungan Kemiskinan dengan Kapasitas Fiskal

Kapasitas fiskal dan pengelolaan sumber daya secara ekonomis, efektif, dan efisien di suatu daerah akan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi daerah tersebut. Hal ini dikarenakan minimnya intervensi dalam hal kebijakan terkait dengan pengelolaan daerah. Di samping itu, aparatur daerah dapat secara inisiatif dan kreatif dalam mengelola daerah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang selanjutnya akan mengurangi tingkat pengangguran dan menurunkan kemiskinan pada daerah tersebut. Sehingga semakin besar kapasitas fiskal suatu daerah, maka semakin besar kemampuan pemerintah dalam mengalokasikan anggaran untuk kepentingan masyarakat miskin yang kemudian mampu mengurangi kemiskinan yang terjadi.

Selaras dengan itu, rendahnya kapasitas fiskal menyebabkan anggaran yang tersedia akan tidak tepat sasaran. Pemerintah tidak dapat menyediakan layanan publik yang berkualitas yang membuat kondisi kemiskinan akan semakin

buruk. Lebih lanjut, kapasitas fiskal yang buruk merusak kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan lembaga yang lain, terutama pada masyarakat miskin. Hal ini dikarenakan orang-orang berpenghasilan rendah sangat tergantung pada layanan pemerintah sebagai kebutuhan dasar –seperti pendidikan dan kesehatan. Kurangnya kepercayaan memiliki konsekuensi ekonomi, yaitu ketika orang memandang bahwa sistem sosial yang tidak dipercaya dan tidak adil, hal ini dapat mempengaruhi insentif untuk terlibat dalam kegiatan produktif daerah tersebut (Chetwynd, et al., 2003).

2.3. Penelitian Terdahulu

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Yudha (2013), Faturrohim (2011), Rustam (2010), Prasetyo (2010), dan Wijayanto (2010) menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan, begitu pula dengan penelitian oleh Yustie (2013) yang menemukan hasil bahwa pertumbuhan ekonomi mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap tingkat kemiskinan pada kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur tahun 2007-2011. Namun, penelitian oleh Barika (2013) justru mengungkapkan bahwa pertumbuhan ekonomi tidak berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan. Hal ini mengindikasikan bahwa pertumbuhan ekonomi yang ada lebih banyak ditopang oleh konsumsi daripada investasi atau modal. Pertumbuhan ekonomi yang tidak berpengaruh tersebut mencerminkan kurangnya kualitas pertumbuhan ekonomi yang ada karena belum mampu dalam mengurangi kemiskinan.

Khoirun Nisa, et al. (2020) meneliti pengaruh ketimpangan pendapatan terhadap kemiskinan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2009-2018. Hasilnya menunjukkan bahwa ketimpangan pendapatan berpengaruh signifikan dan negatif terhadap kemiskinan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Selanjutnya, penelitian serupa dilakukan oleh (Wijayanto, et al., 2016) mengenai

Analisis Keterkaitan Pertumbuhan Ekonomi, Ketimpangan Pendapatan dan Pengentasan Kemiskinan di Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2000 – 2010. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi dan ketimpangan pendapatan di Provinsi Sulawesi Utara berpengaruh negatif terhadap tingkat kemiskinan. Hasil ini berbeda dengan penelitian Rustariyuni (2014) yang mana gini rasio memiliki korelasi positif terhadap kesejahteraan masyarakat, artinya jika ketimpangan pendapatan meningkat akan berpengaruh pada peningkatan kesejahteraan masyarakat dan penurunan kemiskinan.

Kemudian, beberapa riset membuktikan bahwa IPM memengaruhi tingkat kemiskinan di antaranya Sofilda, et al. (2016) menunjukkan bahwa IPM berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan di Kabupaten/kota Provinsi Papua. Selanjutnya, Napitupulu (2007) mengungkapkan bahwa indikator komposit IPM yaitu angka harapan hidup, angka melek huruf, dan konsumsi perkapita mempunyai pengaruh negatif dan signifikan terhadap jumlah penduduk miskin di Sumatera Utara. Wijayanto (2010) juga menyimpulkan bahwa variabel pendidikan dan kesehatan memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan di Jawa Tengah tahun 2005-2008. Namun, penelitian oleh Susilowati dan Wahyudi (2015) menyatakan sebaliknya bahwa IPM tidak berpengaruh terhadap kemiskinan di Indonesia pada periode 1990-2013.

Selanjutnya, penelitian yang dilakukan oleh Rauf (2016), Franciari dan Sugiyanto (2013) mengemukakan adanya pengaruh antara kapasitas fiskal dengan kemiskinan. Kemudian, Sriyana (2015) meneliti tentang kapasitas fiskal dan pengentasan kemiskinan untuk Daerah Istimewa Yogyakarta menggunakan metode data panel dengan kurun waktu 2013 – 2016. Hasilnya adalah belanja publik dan transfer fiskal merupakan variabel penentu untuk tingkat kemiskinan, sebaliknya pendapatan asli daerah (PAD) sendiri memiliki dampak negatif

terhadap tingkat kemiskinan. Secara keseluruhan kapasitas fiskal di antara kabupaten dan kota di Yogyakarta telah berhasil dengan baik untuk meningkatkan kesejahteraan sosial. Di sisi lain, penelitian yang dilakukan oleh Pou, et al. (2015) mengemukakan hal lain, yaitu tidak adanya pengaruh antara kapasitas fiskal dengan kemiskinan.

Sebagaimana uraian dari penelitian terdahulu di atas, dapat disimpulkan bahwa terjadinya ketidakkonsistenan dari hasil penelitian terdahulu mengenai pengaruh variabel pertumbuhan ekonomi, ketimpangan pendapatan, IPM, dan kapasitas fiskal terhadap kemiskinan. Untuk itu, dalam penelitian ini dibutuhkan bukti empiris yang baru terkait dengan hasil penelitian sebelumnya yang tidak konsisten, dengan mengambil studi kasus di Sulawesi Selatan dalam kurun waktu 2010-2021.

2.4. Kerangka Pikir Penelitian

Dalam penelitian ini terdapat empat variabel bebas (pertumbuhan ekonomi, ketimpangan pendapatan, Indeks Pembangunan Manusia, dan kapasitas fiskal) yang mempengaruhi tingkat kemiskinan di Sulawesi Selatan. Pertumbuhan ekonomi adalah indikator yang berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan. Semakin tingginya tingkat pertumbuhan ekonomi maka diharapkan pendapatan regional dapat menyebar kepada seluruh lapisan masyarakat terutama untuk masyarakat miskin sehingga dapat mengurangi tingkat kemiskinan.

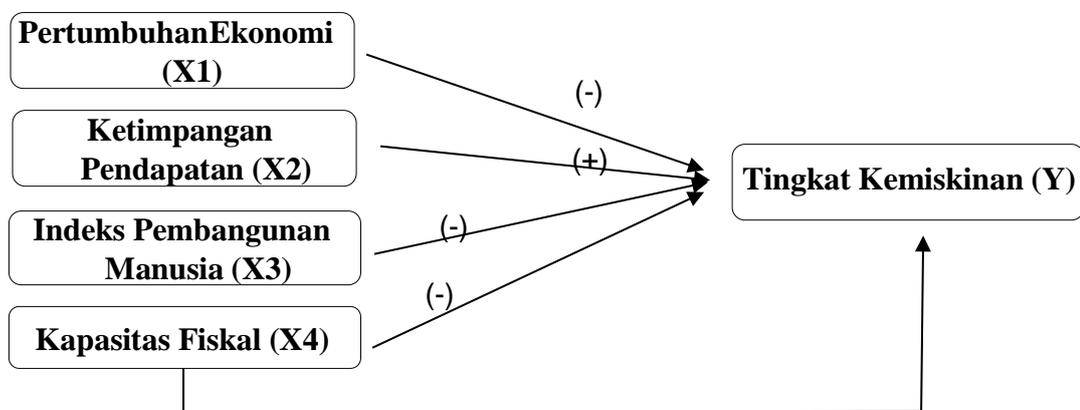
Faktor penyebab kemiskinan selanjutnya adalah kesenjangan pendapatan. Penyebab utama kemiskinan suatu rumah tangga adalah rendahnya pendapatan yang mereka terima. Sebagian besar keluarga miskin memiliki jumlah anggota keluarga yang banyak sehingga kondisi perekonomian mereka yang berada di garis kemiskinan semakin memburuk seiring dengan memburuknya ketimpangan pendapatan atau kesejahteraan (Todaro, 2000). Hubungan antara kesenjangan

dan kemiskinan sebagai hubungan yang pragmatis, yaitu bahwa kesenjangan menyebabkan kemiskinan semakin parah atau kesenjangan adalah bentuk dari kemiskinan (Sugiyarto et al, 2015).

Salah satu penyebab terjadinya kenaikan angka kemiskinan juga dipengaruhi oleh Sumber Daya Manusia (SDM) yang tidak berkualitas. Salah satu tolok ukur yang digunakan dalam melihat kualitas hidup manusia adalah indeks pembangunan manusia. Badan Pusat Statistik (BPS) menyatakan indeks pembangunan manusia dibangun melalui pendekatan tiga dimensi dasar yang mencakup kesehatan, pendidikan, dan kehidupan yang layak. Melalui peningkatan ketiga indikator IPM tersebut diharapkan akan meningkatkan kualitas hidup manusia, sehingga angka kemiskinan akan menurun.

Penguatan kapasitas fiskal di suatu daerah dapat mendorong pertumbuhan ekonomi yang selanjutnya akan mengurangi tingkat pengangguran dan menurunkan kemiskinan pada daerah tersebut. Sehingga semakin tinggi kapasitas fiskal suatu daerah, maka semakin besar kemampuan pemerintah dalam mengalokasikan anggaran untuk kepentingan masyarakat miskin yang kemudian dapat mengurangi kemiskinan yang terjadi.

Berikut adalah bagan kerangka pikir penelitian untuk memperjelas alur pemikiran dalam penelitian ini yang dapat dilihat pada **Gambar 2.1**.



Gambar 2. 1. Bagan Kerangka Pikir Penelitian

2.5. Hipotesis Penelitian

Hipotesis adalah jawaban sementara atau dugaan sementara atas permasalahan penelitian yang memerlukan data untuk menguji kebenaran dugaan tersebut (Kountur, 2007). Berdasarkan kerangka pikir penelitian yang telah dijelaskan dan digambarkan sebelumnya, maka dapat dirumuskan hipotesis penelitian sebagai berikut:

- 1) Diduga pertumbuhan ekonomi berpengaruh negatif terhadap tingkat kemiskinan pada kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2010-2021.
- 2) Diduga ketimpangan pendapatan berpengaruh positif terhadap tingkat kemiskinan pada kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2010-2021.
- 3) Diduga Indeks Pembangunan Manusia berpengaruh negatif terhadap tingkat kemiskinan pada kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2010-2021.
- 4) Diduga kapasitas fiskal berpengaruh negatif terhadap tingkat kemiskinan pada kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2010-2021.